

INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS PANCASILA GUNA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR (LATSAR) CPNS

ENDI TRIYANTO MANYO'E

Widyaiswara BKPSDM Kabupaten Gorontalo

email : radityaaryaguna@gmail.com

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemegang akuntabilitas moral yang baik dan harus menjadi teladan bagi masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai religius dalam dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk mengetahui relevansi nilai-nilai religius Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi pada Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengetahui strategi internalisasi nilai-nilai religius Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi pada Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kategori penelitian kepustakaan, yang diawali dengan tahapan penentuan topik penelitian yang dilanjutkan dengan meninjau literatur terkini, reduksi literatur, pengorganisasian literatur, *review literatur* dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Nilai religius adalah nilai paling relevan digunakan sebagai sumber untuk mencegah korupsi karena keyakinan terhadap keberadaan Allah SWT sehingga akan menimbulkan komitmen kuat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa serta tumbuhnya akuntabilitas spiritual selalu mengingat pertanggungjawaban setiap manusia dengan Allah SWT; 2) Strategi internalisasi nilai-nilai religius dalam upaya pencegahan korupsi pada pembelajaran Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dapat dilakukan berupa model *storytelling*, *leaderless group discussion*, *modelling*, analisa kasus, penanaman nilai edukatif yang kontekstual dan penguatan nilai-nilai yang ada. Dalam rangka optimalisasi internalisasi nilai-nilai agama untuk mencegah korupsi di kalangan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR), secara berkala dilakukakn pemantauan dan mengevaluasi sikap dan perilaku yang ditunjukkan setelah pelaksanaan kegiatan LATSAR CPNS

Kata Kunci: Internalisasi; Nilai Religius Pancasila; Strategi Internalisasi; LATSAR CPNS

ABSTRACT

The State Civil Apparatus (ASN) as a holder of good moral accountability and must be an example for society through the internalization of religious values in realizing public accountability. The writing of this article aims to determine the relevance of Pancasila religious values in an effort to prevent corruption in the Basic Training (LATSAR) for Candidates for Civil Servants (CPNS) and to find out the strategy for internalizing Pancasila religious values in efforts to prevent corruption in Basic Training (LATSAR) Candidates Civil Servants (CPNS). This study uses a qualitative approach with the category of library research, which begins with the stages of determining the research topic followed by reviewing the latest literature, reducing literature, organizing literature, reviewing literature and finally drawing conclusions. The results of the study show that 1) Religious values are the most relevant values used as a source to prevent corruption because of belief in the existence of Allah SWT so that it will lead to a strong commitment to always provide the best for the nation and the growth of spiritual accountability always remembering the responsibility of every human being to Allah SWT; 2) The strategy of internalizing religious values in an effort to prevent corruption in learning Basic Training (LATSAR) for Prospective Civil Servants (CPNS), which can be carried out in the form of storytelling models, leaderless group discussions, modeling, case

analysis, instilling contextual and strengthening educational values existing values. In order to optimize the internalization of religious values to prevent corruption among participants in the Basic Civil Servants Candidate Training (LATSAR), periodically monitor and evaluate the attitudes and behavior shown after the implementation of the CPNS LATSAR activities

Keywords: Internalization; Pancasila Religious Values; Internalization Strategy; CPNS
BACKGROUND

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Semakin banyak orang yang sadar bahwa korupsi adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak orang lain, yang merupakan ciri khas orang Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang pasti akan menentang dan menentang keras korupsi.

Dalam konteks antikorupsi, Pancasila sebagai sumber hukum pencegahan korupsi, berlandaskan pada nilai-nilai yang dikandung Pancasila, terutama nilai Ketuhanan. Nilai-nilai religius ini mengandung makna yang dalam dan bertujuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang berintegritas, bermoral, dan beretika. Hakikat dari nilai-nilai ketuhanan merupakan landasan yang dibentuk dan ditanamkan sebagai penyaring perilaku, arah (*direction*) dan daya dorong (*motive*) manusia yang memberikan kendali kepada manusia (Busroh, 2017).

Tujuan pendidikan yang paling mendasar adalah mengembangkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat lahir generasi-generasi dari proses pendidikan yang ada. Wardoyo (2015), menegaskan bahwa berkarakter berarti memusatkan perhatian pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan pada tindakan atau perilaku, sehingga orang yang berperilaku buruk seperti ketidakjujuran, kekejaman, dan keserakahan dicap sebagai orang yang berkarakter buruk. Sebaliknya, orang yang berperilaku etis dianggap berkarakter yang mulia. Hal ini juga dinyatakan Musfiroh (dalam Isnaini, 2020), bahwa karakter mengacu pada seperangkat sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan.

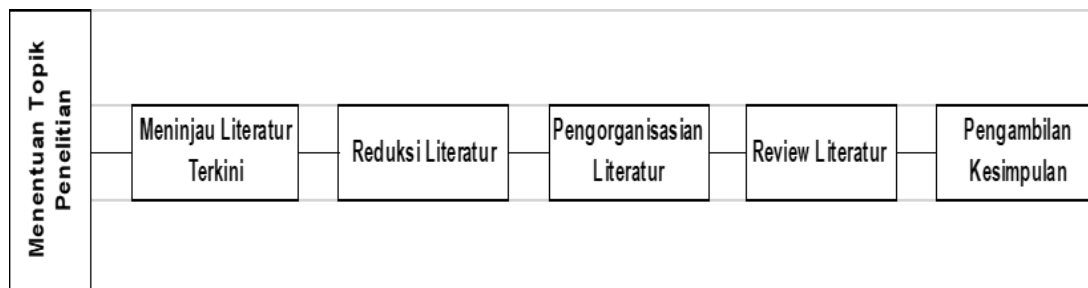
Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu bekerja keras untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila karena sebagai pegawai negeri sipil, karena ASN harus mampu menjadi contoh bagi warga negara lain di masyarakatnya masing-masing untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai pemegang akuntabilitas moral yang baik mendorong akuntabilitas publik yang baik, tentu tidak akan terganggu dan ada sedikit pun niat untuk merugikan, sebaliknya akan ada niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi (LAN, 2015).

Tentunya tanggung jawab besar ini tidak hanya membutuhkan integritas, tetapi juga kompetensi yang diinternalisasikan sejak dini melalui Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurut Mulyasa (dalam Munif, 2017), internalisasi adalah upaya mengapresiasi dan menggali nilai, agar tertanam dalam diri setiap orang. Selanjutnya, ditegaskan bahwa selama internalisasi, proses pendidikan dapat diimplementasikan melalui keteladanan, kebiasaan, penegakan aturan, dan motivasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui relevansi nilai-nilai religius Pancasila guna pencegahan korupsi pada pelaksanaan LATSAR CPNS. Penulis juga bertujuan mengidentifikasi strategi internalisasi nilai-nilai religius Pancasila guna pencegahan korupsi pada pelaksanaan LATSAR CPNS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pancasila guna Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca sumber-sumber perpustakaan dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan seperti buku, *e-book*, *yearbook*, buletin, artikel jurnal. Waktu penelitian dilakukan selama 6 minggu sejak tahapan penentuan topik hingga dengan penyusunan draf artikel. Dalam melakukan analisis data, digunakan metode deskriptif agar hasil analisis dapat dideskripsikan secara mendalam dan detail.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yang dimulai dengan tahapan penentuan topik penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan peninjauan artikel terkini, reduksi literatur, pengorganisasian literatur, *review literatur* dan pengambilan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menentukan topik penelitian, mempertimbangkannya sesuai minat peneliti, memiliki data yang cukup tersedia, memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penulis dapat mempelajari topik tersebut.
2. Tinjau literatur terbaru dengan mengidentifikasi buku, jurnal, peraturan, atau informasi lain yang relevan dengan judul artikel ini ditulis. Dalam peninjauan jurnal, penulis menggunakan sebagian besar artikel terbitan tahun 2015-2022 sesuai dengan kata kunci: internalisasi nilai, nilai religius pancasila, antikorupsi dan pelatihan dasar CPNS (LATSAR).
3. Mereduksi literatur, dengan menganalisis kelayakan artikel yang diulas manusia yang mirip judul dan abstraknya dengan judul penelitian. Artikel-artikel yang mejadi pengecualian adalah artikel-artikel yang dianggap tidak relevan dengan judul dan abstrak serta tidak memiliki kesamaan dengan judul penelitian.
4. Mengorganisasi dokumen, dengan mengelompokkan artikel yang dianalisis pada tahap reduksi dengan pandangan yang sesuai dengan judul penelitian, menurut penulis, judul, tahun, sumber, kata kunci, abstrak, pengecualian/penyertaan, alasan, dan tautan. Tahap ini digunakan untuk lebih mudah menyaring artikel untuk ditinjau.
5. Tinjauan literatur, dengan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesa artikel-artikel yang terkumpul dengan membaca secara berulang tentang judul penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan melihat kesamaan dan perbedaan dari masing-masing artikel.
6. Menarik kesimpulan, dengan cara mengintegrasikan dua atau lebih elemen yang diperoleh pada tahap tinjauan literatur sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Copyright (c) 2023 ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS, disebutkan bahwa LATSAR CPNS bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme, dan semangat dan motivasi kebangsaan, karakter keunggulan dan tanggung jawab, memperkuat profesionalisme dan kompetensi di bidangnya. Selanjutnya disebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam LATSAR CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan peserta, sebagaimana berikut :

1. Peserta mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara;
2. Peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diemban;
3. Peserta mampu menerapkan kedudukan dan peran PNS yang mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peserta mampu menunjukkan kemampuan untuk menguasai kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan dengan bidang tugasnya.

Pembentukan karakter anti korupsi pada ASN menjadi bagian dari pelaksanaan agenda ke 2 melalui pembelajaran agenda nilai-nilai dasar. Pelaksanaan agenda ke 2, yakni agenda nilai-nilai dasar PNS, memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Dalam konteks pembentukan karakter anti korupsi pada ASN, peserta LATSAR CPNS mengikuti pembelajaran mata pelatihan akuntabel. Subtansi mata pelatihan akuntabel adalah bagaimana seorang PNS mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, tekun, disiplin, dan jujur, serta menggunakan harta dan aset pemerintah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien serta tanpa penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka pencegahan korupsi secara dini, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk ASN agar dapat mengembangkan karakter dan integritas yang kuat. Selain itu, perlunya pengawasan dan tindakan disiplin terhadap ASN yang melakukan praktik korupsi perlu ditegakkan secara konsisten dan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pembahasan

1. Relevansi Nilai-Nilai Religius Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Pendidikan Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Nilai agama adalah nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama, dan terdiri dari tiga unsur, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak (LEMHANNAS RI, 2020). Moeljatno mengungkapkan pandangan yang sama (dalam Simanjuntak & Benuf, 2020) bahwa di negara yang berdasarkan Pancasila, ilmu apa pun (termasuk hukum) yang tidak disertai dengan ilmu ketuhanan tidak lengkap karena adanya sila ketuhanan. Sila pertama percaya pada satu Tuhan adalah nilai inti dan nilai sumber, yang akan menjadi kriteria nilai berdasarkan fitrah manusia, penerapan nilai-nilai secara universal dan menyeluruh dan menjadi dasar pandangan, sikap dan perilaku (Widjaja, 2000)

Nilai-nilai agama mencerminkan hubungan antara manusia dengan penciptanya, karena mereka yang memiliki rasa tanggung jawab spiritual selalu mengingat tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan semua agama menolak korupsi. Saat kesadaran antikorupsi mencapai puncaknya, tanggung jawab spiritual ikut bermain, terutama ketika kita menyadari bahwa dampak korupsi bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya nyawa. Wardoyo (2015) juga menekankan hal ini, masyarakat yang berjiwa

Pancasilais pasti menentang dan melarang keras korupsi. Karena kita menyadari bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Tindak pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa atas segala perbuatan hamba-Nya (Saputra, 2017).

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan pandangan dalam Pancasila, oleh karena itu nilai yang paling relevan dijadikan sebagai sumber perlindungan terhadap korupsi adalah nilai sakral sebagai nilai agama. Menjadikan internalisasi nilai-nilai moral agama dalam proses pembelajaran sebagai mata rantai penting yang perlu dikembangkan menjadikan ilmu yang diperoleh khususnya bagi peserta LATSAR CPNS menjadi lebih bermakna. Makna dari proses internalisasi akan menumbuhkan kesadaran individu berupa penolakan terhadap segala bentuk korupsi, yang bertentangan dengan semangat manusia memiliki Tuhan dalam hidup.

Dalam konteks hukum pidana, upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui upaya preventif yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan, pencegahan dan meminimalisir penyebab dan peluang terjadinya korupsi (Herman, 2018). Menurut Simanjuntak & Benuf, (2020), diharapkan perubahan etos dan etika lembaga pengelolaan dan pengelolaan keuangan nasional mampu mendorong pejabat publik untuk aktif dan kondusif bagi terciptanya lembaga keuangan yang transparan, bersih, efektif, akuntabel. dan birokrasi yang efisien.

Selain itu, perilaku lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh lemahnya integritas dan etika lembaga yang mengurus dan mengelola keuangan negara. Waluyo (2017) juga menambahkan bahwa perilaku instansi juga dipengaruhi oleh masing-masing instansi pemerintah yang membentuk sumber daya manusia bagi instansi yang mengelola dan mengelola keuangan negara dengan menerapkan sistem manajemen yang akuntabel.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap ASN yang direkrut memiliki integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik yang kuat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan karakter anti korupsi pada ASN. Dengan demikian, ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam memerangi perilaku koruptif sehingga tercipta suatu *good governance*.

Relevansi nilai-nilai ketuhanan dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat pada pengadopsian nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar pelaksanaan pemberantasan korupsi. Nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan dibentuknya pengelola dan pengelola keuangan negara yang profesional, di mana integritas, etika, dan kompetensi ASN erat kaitannya dengan aspek keagamaan. Ketika kesadaran antikorupsi mencapai puncaknya, tanggung jawab spiritual akan terjamah, terutama bagi ASN yang diberdayakan oleh negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa

Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS), memainkan peran strategis yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, pegawai negeri, perekat dan pemersatu negara serta mengimplementasikan kebijakan tersebut di berbagai sektor pembangunan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan pegawai negeri sipil yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya secara profesional. Pelatihan dasar PNS diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesional PNS sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi PNS sesuai harapan sebagai PNS yang profesional dan berintegritas.

Aparatur Sipil Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi di dalam pemerintahan. Pembentukan karakter ASN yang baik dan integritas yang kuat sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi secara dini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembentukan karakter ASN penting dalam pencegahan korupsi :

1. Memperkuat nilai-nilai integritas

Pembentukan karakter ASN yang baik dapat membantu memperkuat nilai-nilai integritas di dalam organisasi pemerintah. ASN yang memiliki karakter integritas yang

kuat akan mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat membantu mencegah ASN untuk melakukan praktik korupsi.

2. Meningkatkan akuntabilitas

ASN yang memiliki karakter akuntabilitas yang baik akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini dapat membantu mencegah praktik korupsi, karena ASN yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa anggaran dan penggunaan sumberdaya publik yang terkait dengan tugas dan jabatannya dilakukan efektif dan efisien.

3. Mendorong transparansi

ASN yang memiliki karakter transparansi yang baik akan memastikan bahwa semua proses dan keputusan diambil secara terbuka dan transparan. Hal ini dapat mendorong terbukanya informasi terkait tindakan korupsi, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi praktik korupsi dan mengambil tindakan pencegahan dini.

4. Meningkatkan keterlibatan publik

ASN yang memiliki karakter keterlibatan publik yang baik akan berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan tidak ada praktik korupsi yang terjadi

2. Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Religius dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Bagi para pendidik, problem moral yang menjadi perhatian luas menunjukkan bahwa pendidikan belum berfungsi secara optimal untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain melalui pendidikan formal, salah satu upaya untuk membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter dan bermoral adalah dengan menginternalisasikannya melalui pembelajaran (Wiratomo. dkk, 2017).

Internalisasi dalam kerangka psikologis didefinisikan sebagai kombinasi atau penyatuan sikap, sudut pandang, standar perilaku, dll dalam kepribadian. Freud percaya bahwa aspek moral dari superego, atau kepribadian, muncul dari internalisasi sikap orang tua (Chaplin, 2002). Selanjutnya menurut Alim (dalam Munif, 2017), berbagai tahapan dalam proses internalisasi yang terkait dengan *character building* dapat dilanjutkan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap transformasi nilai.

Dalam tahapan ini, hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan siswa atau siswa, yang menginformasikan tentang nilai-nilai baik dan buruk.

2. Tahap transaksi nilai

Pada tahapan transaksi nilai ini, baik guru maupun siswa memiliki inisiatif. Tahap pendidikan nilai merupakan komunikasi dua arah dimana guru tidak hanya memberikan informasi tentang nilai baik atau buruk, tetapi juga terlibat dalam menerapkan dan memberikan contoh praktik dunia nyata, meminta siswa untuk merespon dengan cara yang sama, yaitu menerima dan mempraktikkan nilai-nilai ini.

3. Tahap Transinternalisasi

Dalam tahap ini, tidak hanya melalui komunikasi verbal dan dua arah, tetapi juga sikap dan kepribadian psikologis. Jadi pada tahap ini, komunikasi kepribadian berperan aktif.

Proses internalisasi yang berlangsung adalah proses penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku ke dalam diri individu. Proses perubahan yang penting adalah internalisasi, yang merupakan dimensi kunci dari akuisisi atau perubahan manusia, mulai dari tahapan transformasi, transaksi, dan trans-internalisasi nilai, melalui pembinaan, pendampingan, dll.,

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu nilai dan standar yang diharapkan.

Perspektif yang beragam tentang nilai-nilai religius dapat mempengaruhi strategi yang berbeda dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam penelitiannya, Khulaemi (2021) menyatakan bahwa penggunaan metode diskusi kelompok tanpa pemimpin untuk memberikan materi kepada dosen tentang nilai-nilai antikorupsi dalam pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri mengakibatkan pemahaman materi peserta berupa:

1. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Pendekatan ini melatih peserta diskusi untuk mengambil inisiatif, memberikan arahan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab
2. Dukungan dan kerjasama
Metode ini melatih peserta untuk bersikap suportif dan menghargai orang lain.
3. Interaksi dan *Public Speaking*
Pendekatan ini akan memungkinkan peserta untuk menunjukkan kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat mereka dalam diskusi.
4. Analisis dan Pembahasan Interpretasi
Metode ini melatih peserta untuk menganalisis diskusi untuk memahami materi yang telah mereka peroleh berdasarkan pengetahuan mereka.
5. Membuat dan mengkonseptualisasikan
Pendekatan ini akan melatih keterampilan pemecahan masalah yang berguna untuk menangani masalah yang muncul saat diskusi berlangsung.
6. Beradaptasi dan menyelesaikan konflik
Pendekatan ini akan melatih kemampuan untuk menengahi dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mempengaruhi LGD berdasarkan waktu yang ditentukan.
7. Mengorganisir dan melaksanakan diskusi
Pendekatan ini akan mendorong peserta untuk dapat berdiskusi dengan teman satu timnya tanpa seorang pemimpin diskusi.

Temuan Trisnawati & Sundari (2020) menunjukkan bahwa model pembelajaran dengan menggunakan *Problem Based Learning* (PBL) dan *Group Investigation* (GI) dapat efektif dalam meningkatkan karakter antikorupsi siswa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama pembelajaran dengan model PBL dan model GI, siswa tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang digunakan. Mereka tampak antusias mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas dan tugas kelompok.

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa *storytelling* merupakan metode yang menghidupkan peserta diklat, membuat situasi belajar menjadi menarik, meningkatkan motivasi peserta, dapat meningkatkan hasil belajar, dan sejalan dengan tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan resistensi. Mendorong perilaku korupsi melalui perilaku amanah dan jujur (Lestyowati, 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa peserta LATSAR CPNS lebih banyak merespon dengan bercerita selama kursus, seperti tertarik, menyukai, kagum, mengagumi cerita, dan membuat komitmen untuk menghindari praktik korupsi. Ketiga temuan di atas memiliki kesamaan dalam strategi yang digunakan dalam pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan, yang dirancang untuk memungkinkan siswa berpikir kritis dan membentuk etika melalui analisis kasus korupsi. Menurut Warpala (2019), pembelajaran kontekstual bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan sosial, karena konsep pembelajaran kontekstual pada dasarnya menghubungkan materi pembelajaran dengan dinamika, masalah, dan realitas kehidupan manusia.

Pembelajaran kontekstual memiliki landasan filosofis dalam konstruktivisme. Hal ini terlihat pada lima unsur pembelajaran konstruktivis yang harus diperhatikan dalam praktik

pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson (dalam Warpala, 2019) kelima elemen tersebut adalah :

1. *activating knowledge*, dengan mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada;
2. *acquiring knowledge*, yakni pemerolehan pengetahuan baru yang didapatkan dengan mempelajari secara keseluruhan dan memperhatikan detailnya;
3. *understanding knowledge*, yakni pemahaman pengetahuan yang diperoleh melalui tahapan penyusunan hipotesis, melakukan sharing, revisi, dan pengembangan konsep;
4. *applying knowledge*, dengan mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh; dan
5. *reflecting knowledge*, dengan melakukan refleksi atau perenungan.

Model pembelajaran kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang memiliki konsep yang menghubungkan topik dengan situasi dunia yang faktual. Hal ini juga ditegaskan oleh Berns & Erickson (dalam Ramdani, 2018) bahwa pembelajaran kontekstual akan memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan dengan aplikasi kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tahap ini, perlu dilakukan optimalisasi kualitas proses pembelajaran dengan memilih metode pembelajaran yang berorientasi pada transfer informasi dan berbagai variasi konten mata kuliah kontekstual (Warpala, 2019). Terkait dengan hal tersebut perlunya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pelatihan yang ekstensif, dengan metode baru berdasarkan kondisi saat ini. Penggunaan metode pembelajaran bukan lagi merupakan penanaman implementasi BP7 era Orde Baru.

Perbedaan pemahaman atau persepsi tentang nilai-nilai moral agama yang ditanamkan menyebabkan pemilihan berbagai metode. Hal ini sesuai dengan temuan (Murdiono, 2010) yang menyatakan bahwa strategi internalisasi nilai moral dan agama dalam pembelajaran dapat berupa:

1. Strategi keteladanan (*modelling*)
Nilai moral religius dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui keteladanan, yakni :
 - a. Keteladanan internal, melalui melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dia lakukan didalam kelas dapat diteladani oleh peserta didik.
 - b. Keteladanan eksternal, dengan cara menyajikan cerita tentang tokoh-tokoh agama, tokoh publik yang memiliki integritas untuk dapat dijadikan sebagai teladan
2. Analisa masalah atau kasus
Peserta didik dapat menemukan nilai-nilai religius seperti ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab, setelah membahas atau menganalisis kasus yang ada dalam artikel.
3. Penanaman nilai-nilai edukatif yang kontekstual
Unsur-unsur edukatif penting yang patut untuk dipelajari yang sifatnya kontekstual dan aktual menjadi muatan yang substantif dari knsep-konsep yang dikembangkan.
4. Penguatan nilai-nilai yang ada
Upaya penguatan nilai-nilai moral religius tersebut untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan strategi yang dilakukan dengan sebuah asumsi bahwa peserta didik telah memiliki nilai-nilai moral religius seperti ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab.

Pelatihan dasar CPNS ini memberikan akses kepada CPNS terhadap materi pelatihan yang komprehensif sebelum menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil di tempat kerja. Pelatihan ini menggabungkan teori klasik dan teori non klasik dalam praktik kerja, Copyright (c) 2023 ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik

sehingga CPNS dapat menerapkan teori yang ada pada pelatihan dasar kerja CPNS ini. Realisasi yang akan diterapkan adalah tugas dan tugas yang rutin dilakukan di tempat kerja setiap hari sehingga menjadi kebiasaan untuk menerapkan teori klasik pelatihan dasar ini ke tempat kerja sehari-hari.

Melalui metode pelatihan ini diharapkan PNS dapat kembali bekerja dengan kebiasaan terstruktur yang positif, menjadi PNS yang profesional, dan menguasai bidang pekerjaan, sehingga dapat membantu PNS tersebut dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Pembinaan pasca-pelatihan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pembinaan, insentif menulis dan audio, dan metode ketiga adalah metode penghargaan. Pendekatan melalui pendampingan atasan dan fasilitator pasca pelatihan lebih efektif dalam menegakkan nilai-nilai antikorupsi/integritas di tempat kerja (Kismanto, 2019).

Internalisasi adalah upaya untuk mengembangkan secara mendalam nilai-nilai agama (agama) dan nilai-nilai pendidikan ke dalam keseluruhan kehidupan, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam kepribadian peserta didik, menjadikannya watak atau karakter peserta didik. Mentalitas antikorupsi ini tercapai jika kita secara sadar menumbuhkan kemampuan generasi mendatang untuk mengenali kelemahan sistem nilai warisan mereka dan memperbaiki sistem nilai warisan dalam konteks baru yang menerapkan nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN yang profesional dan berintegritas

KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan sebelumnya mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Pembelajaran Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

- 1) Nilai religius sebagai nilai-nilai kehidupan berupa aqidah, ibadah dan ahlak adalah nilai paling relevan digunakan sebagai sumber untuk mencegah korupsi karena keyakinan terhadap keberadaan Allah SWT sehingga akan menimbulkan komitmen kuat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa serta tumbuhnya akuntabilitas spiritual selalu mengingat pertanggungjawaban setiap manusia dengan Allah SWT
- 2) Perspektif yang berbeda tentang nilai-nilai religius akan mempengaruhi strategi yang berbeda yang digunakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran.
- 3) Beberapa strategi internalisasi nilai-nilai religius dalam upaya pencegahan korupsi pada pembelajaran Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dapat dilakukan berupa *model storrtelling*, *Leaderless Group Discussion*, *modelling*, analisa kasus, penanaman nilai edukatif yang kontekstual dan penguatan nilai-nilai yang ada

Dalam rangka optimalisasi internalisasi nilai-nilai agama untuk mencegah korupsi di kalangan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR), secara berkala dilakukakn pemantauan dan mengevaluasi sikap dan perilaku yang ditunjukkan setelah pelaksanaan kegiatan LATSAR CPNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *Lex Publica*, IV(1), 631–644.
- Chaplin. (2002). *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada.
- Herman (2018). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 306.
- Isnaini (2020). Kajian reflektif: Relevansi pendidikan humanis-religius dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7(1), 26–34.

- Khulaemi (2021). Metode Leaderless Group Discussion (Studi Kasus Efektivitas Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Latsar CPNS Kemendikbud). *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(2), 85–92.
- Kismanto (2019). Pembinaan Pasca Diklat Untuk Menjaga Nilai-Nilai Integritas Di Tempat Kerja. *Cendekia Niaga*, 3(1), 38–59.
- LAN RI. (2015). *Modul : Anti Korupsi*. LAN RI.
- LEMHANNAS RI. (2020). Modul : Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila. In *LEMHANNAS RI*. LEMHANNAS RI.
- Lestyowati (2020). Metode Storytelling : Peningkatkan Motivasi Perilaku Antikorupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 125–139.
- Munif (2017). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Pai Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1–12.
- Murdiono (2010). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(3), 99–111.
- Ramdani (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1.
- Saputra (2017). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia. *JPPKn*, 2(1), 9–17.
- Simanjuntak & Benuf (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), 22–46.
- Trisnawati & Sundari, S. (2020). Efektifitas Model Problem Based Learning dan Model Group Investigation dalam Meningkatkan Karakter Anti Korupsi. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 203–214.
- Waluyo (2017). Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Lex Publica*, IV(1), 623–726.
- Wardoyo (2015). Membangun Jatidiri Bangsa Menuju Generasi Emas 2045 Yang Religius. *Tadrîs*, 10(1), 90–103.
- Warpala (2019). Pembelajaran Kontekstual : Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural dan Belajar Untuk Penemuan. *Media Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 21–27.
- Widjaja (2000). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta.
- Wiratomo. dkk. (2017). Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Guru PPKn Jenjang SMP di Kota Semarang. *Integralistik*, 28(2), 119–130.